

Analisis Konten Viral Terhadap Respon Kebijakan Pemerintah

Ifmania Luhri

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: luhri1616@gmail.com

Abstract

This study examines the relationship between viral content on social media and government policy responses, as well as explores the role of influencers and the younger generation in disseminating such content. The primary issues examined relate to the rapid surge in public attention triggered by the viral nature of content and its impact on prompting the government to respond swiftly and wisely in line with public expectations. A literature review method was applied in this study through the process of collecting and analyzing various sources deemed credible and relevant, such as book chapters and scientific journals discussing the phenomenon of virality on social media and its connection to public policy. The research findings indicate that the role of influencers and the younger generation is significant in shaping public opinion and increasing social pressure; however, limitations related to digital literacy levels remain. Political communication has been transformed by social media into a more participatory and open process and is utilized by the public as an instrument of social oversight. The government needs to implement flexible and structured communication strategies in responding to viral content with the aim of improving accountability and the quality of public services within the context of digital democracy. Strengthening digital literacy and increasing active public engagement are recommended in this study as efforts to support the creation of a responsive and accountable system of government.

Keywords: *Viral content, social media, government policy responses, digital democracy*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Media sosial adalah alat komunikasi berbasis digital yang memudahkan pengguna untuk berbagi informasi dan berinteraksi secara real-time tanpa terhalang oleh jarak geografis, Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016), mengatakan bahwa media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan. Perkembangan media sosial di Indonesia berlangsung

dengan cepat, dengan jutaan pengguna aktif yang menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Fenomena viral di media sosial ditandai oleh penyebaran konten yang berlangsung secara luas dan cepat serta perhatian publik dan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, berhasil ditarik melalui proses tersebut, viralitas konten tidak semata-mata dibentuk oleh karakteristik konten itu sendiri dan dipengaruhi pula oleh pola komunikasi yang berkembang, mekanisme algoritma platform, serta keterlibatan aktif pengguna dalam mendistribusikan informasi (Azmi, 2025). Putri et al. (2025) menjelaskan bahwa media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan ideologis yang bersifat positif dan pada saat yang sama platform tersebut digunakan untuk kepentingan lain yang bersifat destruktif seperti penyebaran pesan yang mendorong pandangan atau perilaku ekstrem dan membahayakan dan upaya kolektif yang mencakup penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan aktif oleh platform serta pemerintah, peningkatan kesadaran digital di kalangan masyarakat dibutuhkan agar peredaran konten berbahaya dapat ditekan serta media sosial dapat difungsikan sebagai sarana komunikasi yang produktif dan aman bagi seluruh pengguna.

Pada era digital saat ini, perhatian publik dalam skala luas sering diarahkan pada konten viral di media sosial dan berbagai aspek kehidupan termasuk politik turut terdampak oleh fenomena tersebut, konten viral dengan mudah memengaruhi generasi muda sebagai pengguna aktif yang banyak terpapar informasi yang disebarluaskan oleh influencer. Opini publik dan perilaku generasi muda dapat dibentuk oleh influencer sehingga peran mereka diposisikan sebagai elemen penting yang berkontribusi dalam percepatan respons kebijakan pemerintah, Aspirasi dan kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda dapat disuarakan secara langsung dan masif melalui interaksi di media sosial serta perubahan kebijakan yang lebih responsif turut didorong melalui mekanisme tersebut dan Kemampuan memilah informasi dan penguasaan literasi digital perlu dimiliki oleh generasi muda agar arus informasi dapat dipahami secara kritis, berbagai platform media diakses secara aktif oleh generasi digital dan keterbatasan dalam mengkurasi serta menyaring informasi menyebabkan kesulitan dalam membedakan informasi yang relevan dengan informasi yang bersifat repetitif (Salim, 2025) dan Penguatan literasi digital dipandang sebagai kebutuhan utama agar keberadaan konten viral mampu memberikan dampak yang konstruktif.

Dalam konteks ini, pengaruh influencer di media sosial dipandang semakin signifikan pada era digital khususnya dalam bidang pemasaran, isu sosial, politik dan opini publik dapat dibentuk dan perilaku banyak individu dapat diarahkan melalui konten yang diproduksi dan dipublikasikan oleh influencer. Hubungan kedekatan dan kepercayaan yang telah dibangun dengan para pengikut menjadikan influencer sebagai aktor utama dalam proses penyebaran konten viral dan Informasi yang tidak selalu didasarkan pada fakta juga disebarluaskan oleh sebagian influencer terutama pada isu-isu sensitif (Hernawan, 2024), kondisi tersebut berpotensi memicu peredaran berita palsu

atau informasi menyesatkan dan pandangan masyarakat dapat terpengaruh secara negatif. Dalam ranah politik, dukungan publik dapat dihimpun dan gagasan dapat dipromosikan serta kritik dapat disampaikan kepada masyarakat melalui peran influencer dan pengaruh influencer tidak terbatas pada aspek komersial dan dinamika sosial serta kebijakan publik turut dipengaruhi secara signifikan dan Pemahaman terhadap peran ini perlu dimiliki oleh pemerintah agar fenomena media sosial dapat dikelola secara efektif dan strategis.

Konten viral juga dimanfaatkan dalam konteks pemerintahan sebagai bahan evaluasi serta dasar pembentukan kebijakan dan Kritik dan sindiran yang disampaikan publik melalui konten viral kerap mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan atau menyampaikan klarifikasi, Ramadhani et al (2025) menyatakan bahwa sindiran dipahami sebagai bentuk ekspresi tidak langsung yang memuat kritik tersirat melalui penggunaan gaya bahasa seperti metafora, ironi, hiperbola, dan pertanyaan retorik. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui media sosial tercermin semakin dinamis melalui kondisi tersebut serta konten viral difungsikan sebagai saluran komunikasi yang efektif dalam praktik demokrasi modern.

Peran media sosial dalam pembentukan opini publik tidak dapat diabaikan karena penyebaran pesan dapat dilakukan secara cepat melalui berbagai platform dan pandangan banyak orang berpotensi diubah oleh arus informasi tersebut, penyebaran informasi yang cepat dan luas dimungkinkan oleh media sosial dan kondisi ini berpotensi membentuk ulang cara pandang masyarakat dan peningkatan intensitas penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam pengelolaan informasi yang berkembang di ruang digital serta dalam menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian respons yang cepat dan terstruktur (Suhendra dan Pratiwi, 2024), Permasalahan tersebut perlu dihadapi dengan membangun strategi komunikasi yang fleksibel dan terbuka serta dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi agar perubahan informasi dapat ditanggapi secara efektif dan kesadaran digital masyarakat dapat ditingkatkan untuk mendukung proses penyaringan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Konten viral dengan kecepatan penyebaran dan jangkauan yang luas menjadikannya sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang sulit disalurkan melalui mekanisme komunikasi konvensional dan Dinamika viralitas perlu dipahami secara mendalam untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap proses pembentukan kebijakan publik dan tantangan dalam pengelolaan informasi digital juga semakin dirasakan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Kepercayaan publik dapat dipertahankan dan potensi kesalahpahaman sosial dapat dicegah apabila respons terhadap konten viral disampaikan secara cepat dan tepat serta didukung oleh sistem yang terstruktur sehingga tidak bersifat reaktif semata dan mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Konten viral sering kali digunakan untuk mengangkat isu yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan kondisi tersebut

mencerminkan kebutuhan serta harapan publik yang berkembang dan media sosial memungkinkan setiap individu mempublikasikan berbagai jenis informasi tanpa batasan yang jelas sehingga tingkat kontribusi yang bernilai dan otoritas sumber informasi menjadi sulit untuk diidentifikasi (Harry, 2017). Situasi ini menimbulkan kesulitan dalam membedakan informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan dan kebutuhan akan sistem verifikasi konten yang lebih efektif menjadi semakin penting serta kesadaran pengguna perlu ditingkatkan agar proses pemeriksaan fakta dilakukan sebelum informasi diterima dan disebarluaskan. Respons pemerintah terhadap fenomena viral dapat dipersepsikan sebagai bentuk keseriusan dalam menyerap aspirasi masyarakat yang tersebar luas melalui platform media sosial dan Pola komunikasi politik tidak lagi dibentuk secara linier satu arah melalui media sosial dan interaksi yang terbuka serta dialogis berlangsung di ruang digital (Harry, 2017), media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah sekaligus sebagai mekanisme pengawasan sosial yang berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara konten viral di media sosial dan respons kebijakan pemerintah, dan fokus kajian diletakkan pada bagaimana konten viral yang tersebar luas di masyarakat dapat mempengaruhi serta mendorong perumusan penyesuaian dan perubahan kebijakan publik oleh pemerintah. Peran konten viral sebagai media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga dikaji secara mendalam serta efektivitas respons kebijakan dievaluasi berdasarkan aspirasi publik yang disampaikan melalui konten viral.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini berupa pendekatan literature review, pendekatan literature review didefinisikan sebagai metode yang dilakukan secara sistematis, eksplisit, dan reproduisibel untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai karya ilmiah dan gagasan konseptual yang telah dihasilkan oleh peneliti dan praktisi sebagaimana dikemukakan oleh Ulhaq et al. (2020). Informasi penelitian dihimpun dari beragam sumber yang telah tersedia, meliputi artikel ilmiah, buku, serta jurnal yang relevan dengan topik konten viral di media sosial dan dampaknya terhadap respons kebijakan pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian dan pemilihan sumber yang dinilai relevan serta terpercaya melalui media internet dan perpustakaan digital dan sumber-sumber yang terpilih selanjutnya ditelaah secara cermat untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai temuan serta pengetahuan yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu dan data penelitian juga diperoleh dari berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan fenomena konten viral di media sosial serta keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah

dan seluruh sumber tersebut dianalisis secara mendalam guna memastikan kesesuaian dengan fokus kajian.

Setelah seluruh data terkumpul, isi dari berbagai sumber dianalisis dan dirumuskan kesimpulannya secara sistematis sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti, pendekatan ini menempatkan penelitian pada kajian terhadap data sekunder tanpa melakukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei serta menitikberatkan pada penyusunan sintesis hasil penelitian yang telah ada. Melalui metode ini, pola dan keterkaitan antara konten viral di media sosial dan respons pemerintah dapat diidentifikasi serta peran generasi muda dalam fenomena tersebut dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan Pada akhirnya, hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh dan mudah dipahami mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Hubungan Konten Viral di Media Sosial dengan Respons Kebijakan Pemerintah

Konten viral di media sosial menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah karena isu-isu tertentu dapat dengan cepat diangkat ke ruang publik dan dijangkau oleh khalayak yang luas dan isu-isu tersebut sering kali direspons secara segera oleh pemerintah untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan publik dan potensi kekacauan sosial. Tekanan massa yang intensif akibat viralitas konten sebagaimana dikemukakan oleh Antara News (2025) kerap mendorong terjadinya perubahan kebijakan secara mendadak dan salah satu contoh dapat dilihat pada video viral yang disiarkan Metro TV News mengenai kasus Ompreng MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang menampilkan proses pencucian nampan menggunakan air kotor dan memunculkan kekhawatiran publik terhadap kualitas program tersebut. Menindaklanjuti kondisi tersebut operasional dapur MBG di Kabupaten Bandung Barat dihentikan sementara oleh pemerintah daerah setelah praktik pencucian nampan diketahui tidak memenuhi standar higienis dan melalui langkah tersebut komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan pada program MBG ditunjukkan demi melindungi kesehatan anak-anak sekolah. Gussela et al (2025) menegaskan bahwa desakan publik yang tercipta akibat viralitas peristiwa di media sosial mempercepat proses penyelidikan dan penegakan hukum serta respons yang cepat dan bertanggung jawab mampu meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik dan dengan demikian viralitas berperan sebagai faktor pendorong yang signifikan dalam mempercepat evaluasi dan revisi kebijakan publik agar selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis.

Demonstrasi besar yang berlangsung pada Agustus 2025 terkait usulan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta menjadi ilustrasi nyata bagaimana isu yang viral memicu gelombang kemarahan publik secara luas dan

aksi yang dikenal sebagai “Revolusi Rakyat Indonesia” tersebut diselenggarakan di berbagai kota dan dipusatkan di depan gedung DPR Jakarta serta sempat berkembang menjadi ricuh ketika para pendemo dihadang oleh aparat keamanan (Kompas.com, 2025). Ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan distribusi subsidi ditekankan oleh para demonstran yang sebagian besar berprofesi sebagai pengemudi ojek daring di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah dan Eskalasi situasi diperparah dengan tersebarnya video viral mengenai Affan Kurniawan seorang pengemudi ojek daring yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis kepolisian saat keriuhan demonstrasi terjadi (Okezone, 2025). Tragedi tersebut direspons oleh pemerintah melalui penurunan personel keamanan menyelidiki terhadap kasus kematian Affan pemberian bantuan kepada keluarga korban serta penerapan moratorium atau penangguhan tunjangan kontroversial bagi anggota DPR yang diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 (CNBC Indonesia, 2025) dan langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya meredam kecaman publik dan menjaga stabilitas sosial politik di tengah tekanan masyarakat yang meningkat (BBC, 2025).

Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tekanan besar terhadap pemerintah dihasilkan dari penyebaran konten viral di media sosial sehingga respons yang cepat dan bertanggung jawab menjadi tuntutan publik, dan proses evaluasi serta revisi kebijakan publik dapat dipercepat melalui viralitas isu sosial ekonomi maupun kasus kemanusiaan dan kebijakan yang dihasilkan diharapkan tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat yang semakin kritis serta aktif memanfaatkan media sosial sebagai ruang diskusi publik.

2. Peran Influencer dan Generasi Muda dalam Penyebaran Konten Viral dan Dampaknya pada Kebijakan

Opini publik kerap dibentuk dan penyebaran konten viral dipercepat oleh influencer melalui kedekatan serta kepercayaan yang telah dibangun dengan para pengikutnya terutama dari kalangan generasi muda, informasi viral disebarluaskan secara intensif oleh generasi muda yang diposisikan sebagai pengguna aktif media sosial dan sekaligus menjadi kelompok yang relatif mudah dipengaruhi. Hernawan (2024) menjelaskan bahwa peran influencer dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam perancangan kebijakan pengaturan arus informasi guna mencegah dampak negatif berita palsu dan disinformasi, tanggung jawab dalam penyampaian pesan publik juga dapat didorong oleh pemerintah kepada influencer demi terjaganya stabilitas informasi. Pengaruh influencer bahkan dapat digunakan untuk memperkuat tekanan politik melalui viralitas konten yang dibagikan terutama dalam upaya penggalangan dukungan dan penyampaian kritik terhadap kebijakan tertentu.

Perubahan sosial dapat dipercepat oleh generasi muda melalui aktivitas merespons dan membagikan konten viral sehingga respons pemerintah turut terdorong secara lebih cepat dan Kerentanan terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi tetap dihadapi oleh generasi muda akibat keterbatasan literasi digital yang dimiliki. Husairi et al dan (2025) mengemukakan bahwa

strategi komunikasi perlu dikembangkan oleh pemerintah melalui integrasi data dan narasi yang relevan dengan kehidupan masyarakat serta kolaborasi dengan konten kreator agar pesan kebijakan disampaikan secara lebih responsif dan persuasif, kebutuhan untuk memperkuat literasi digital semakin terlihat agar konten positif dapat menjadi lebih dominan dalam ruang publik, peran influencer dan generasi muda pada akhirnya tidak hanya membentuk pola komunikasi sosial dan turut memberikan dampak langsung terhadap proses kebijakan publik yang bersifat responsif dan adaptif.

Peluang baru bagi pemerintah untuk berinovasi dengan pendekatan kebijakan publik yang partisipatif dan transparan dibuka melalui keterlibatan influencer dan generasi muda dalam lingkungan digital dan kedekatan emosional dengan audiens kerap tercipta melalui konten yang disajikan influencer yang bersifat personal dan transparan sehingga opini publik lebih mudah dibentuk (Hernawan, 2024). Informasi kebijakan dapat disebarluaskan secara lebih luas dan mudah diterima melalui kolaborasi aktif pemerintah dengan influencer yang memiliki basis pengikut besar terutama di kalangan generasi muda sebagai pengguna utama platform digital dan tantangan tetap muncul dalam pengelolaan penyebaran viral yang sering memicu respons publik yang reaktif dan emosional sehingga kebijakan perlu direspons secara cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan Mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah influencer dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif serta mengoptimalkan manfaat positif dari konten viral. Pendekatan ini sekaligus mendorong peningkatan literasi digital yang memungkinkan generasi muda menyaring informasi secara kritis dan memperkuat validitas serta efektivitas kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Sinergi antara pemerintah influencer dan generasi muda pada akhirnya dapat membentuk ekosistem komunikasi digital yang sehat dan mendukung perubahan kebijakan yang adaptif serta progresif.

3. Dinamika Interaksi antara Masyarakat dan Pemerintah di Media Sosial

Komunikasi politik yang sebelumnya berlangsung secara linier dan satu arah kini telah diubah oleh media sosial menjadi proses yang bersifat interaktif dan partisipatif, menurut Gunawan (2024) partisipasi politik masyarakat melalui pemanfaatan media sosial menjadikan demokrasi digital sebagai salah satu bentuk keterlibatan publik yang signifikan. Komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah diperkuat melalui interaksi ini dan dialog langsung serta transparansi dalam proses perumusan kebijakan semakin ditingkatkan.

Perubahan cara memperoleh informasi dan keterlibatan masyarakat dalam diskursus politik secara real time dijelaskan oleh Assadiyah (2025) sebagai konsekuensi dari berkembangnya media sosial dan dalam praktiknya, aspirasi kritik dan dukungan disuarakan secara luas oleh masyarakat melalui media sosial dan pemerintah didorong agar menunjukkan respons yang lebih adaptif. Penegasan kembali disampaikan oleh Gunawan (2024) bahwa peningkatan partisipasi dalam demokrasi digital berkontribusi pada penguatan legitimasi

kebijakan pemerintah dan kepercayaan publik dapat dibangun ketika komunikasi aktif dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial dan kesenjangan informasi dapat diperkecil. Tantangan besar juga dihadirkan dalam bentuk penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan pengelolaan respons pemerintah perlu dilakukan melalui mekanisme yang sistematis serta terstruktur agar penanganan aspirasi daring tidak bersifat emosional dan sesaat, dinamika tersebut menunjukkan pergeseran komunikasi politik menuju model interaktif yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan modern.

Interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam ranah kebijakan publik secara mendasar telah mengalami perubahan seiring dengan kehadiran media sosial, media sosial tidak lagi diposisikan hanya sebagai saluran komunikasi satu arah dan telah berkembang menjadi ruang dialog partisipasi serta pengawasan sosial yang dinamis dan aspirasi keluhan dan dukungan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan maupun dirancang dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat melalui platform ini. Ruang publik virtual juga difasilitasi oleh media sosial sehingga opini dan narasi kebijakan dapat berkembang secara cepat dan meluas serta memengaruhi penetapan prioritas agenda pemerintah, responsivitas dan kemampuan adaptasi menjadi tuntutan utama bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan terhadap arus masukan yang bersifat real time dan berskala besar. Mekanisme komunikasi yang strategis dan berbasis data diperlukan agar respons kebijakan bersifat konstruktif dan Fungsi pengawasan sosial juga dijalankan oleh media sosial melalui pemantauan implementasi kebijakan dan tuntutan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan kontribusi besar media sosial dalam demokratisasi kebijakan publik ditunjukkan melalui penguatan transparansi partisipasi serta akuntabilitas pemerintahan secara lebih inklusif sementara tantangan berupa ketidakakuratan informasi dan potensi polarisasi tetap memerlukan penanganan yang serius.

4. Kritik dan Sindiran dalam Konten Viral sebagai Alat Kontrol Sosial

Pengendalian perilaku sosial dalam demokrasi digital secara efektif dijalankan melalui konten viral yang memuat kritik dan sindiran, ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat disampaikan oleh masyarakat secara kreatif melalui penggunaan metafora ironi dan hiperbola tanpa harus menghadirkan konfrontasi langsung. Daya tarik kritik meningkat dan penerimaannya oleh masyarakat luas menjadi lebih mudah melalui pendekatan bahasa tersebut, Hidayat dan Ramadhan (2025) menegaskan bahwa pengorganisasian ketidakpuasan secara kolektif oleh masyarakat melalui tagar viral serta konten sindiran dan kritik menghasilkan tekanan sosial yang kuat terhadap pemerintah. Diskusi yang meluas sering dipicu oleh sindiran viral dan dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang digital tetapi juga menjangkau dimensi sosial dan politik yang lebih luas serta mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan sebagai respons terhadap aspirasi publik.

Dalam perspektif sosial, sindiran diposisikan sebagai bagian dari budaya komunikasi digital yang memperkaya mekanisme pengawasan informal terhadap pemerintah dan Ketidakpuasan publik tidak hanya ditampilkan melalui konten sindiran dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan serta kinerja pemerintah juga dapat diukur melalui fenomena tersebut. Partisipasi publik yang bersifat konstruktif tercermin dalam konten sindiran yang berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dan Fenomena ini perlu dipahami dan direspons oleh pemerintah sebagai sinyal evaluatif dalam perumusan kebijakan dan peningkatan tata kelola dan Perkembangan demokrasi partisipatif di era media sosial direpresentasikan oleh alat kontrol sosial berbasis digital ini di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan melainkan aktor aktif dalam proses pengawasan dan pemberian pengaruh terhadap kebijakan publik. Strategi komunikasi pemerintah yang responsif dan transparan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dinamika interaksi tersebut serta dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah arus informasi digital yang terus meningkat dan fungsi sindiran viral sebagai kontrol sosial informal juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam konteks demokrasi digital sebagaimana ditegaskan oleh Salsabila et al. (2025).

5. Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah dalam Merespons Konten Viral

Respons pemerintah terhadap konten viral di media sosial dikelola dalam situasi yang penuh tantangan terutama terkait kecepatan serta ketepatan penanganan isu yang terus berkembang, di tengah era disrupsi digital pemerintah tidak hanya dituntut untuk merespons tekanan digital secara cepat dan tepat. Strategi komunikasi publik yang adaptif transparan serta terkoordinasi juga perlu ditetapkan guna menjaga kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh RadVoice Indonesia tahun 2025 Tantangan lain dihadirkan oleh kecenderungan respons yang dibentuk secara reaktif dan dipengaruhi tekanan sesaat tanpa perumusan solusi jangka panjang Di sisi lain peluang yang muncul dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan transparansi dalam proses kebijakan dan perluasan ruang partisipasi publik Wirakusuma dan Riwanto tahun 2022 menjelaskan bahwa pemanfaatan media digital oleh pemerintahan mencerminkan komitmen pelayanan publik yang dijalankan secara optimal dengan melibatkan masyarakat. Literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar disinformasi dapat dihindari dan aspirasi publik dapat disampaikan secara lebih berkualitas Media sosial dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai saluran strategis untuk mendeteksi isu baru dan mengantisipasi potensi konflik sosial dan melalui perencanaan komunikasi yang matang respons pemerintah dapat disusun secara lebih sistematis serta efektif Peningkatan kualitas tata kelola dan perbaikan citra publik dapat dicapai ketika tantangan dihadapi secara terencana dan peluang dimanfaatkan secara maksimal.

Pengembangan sistem deteksi dini terhadap persoalan publik juga perlu dilakukan oleh pemerintah melalui pemanfaatan teknologi big data serta kecerdasan buatan sehingga pemantauan dan analisis sentimen publik dapat dilakukan secara real time. Melalui mekanisme tersebut isu yang berpotensi meluas dapat diantisipasi sejak tahap awal dan penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat. Keseimbangan antara kecepatan dan akurasi serta antara tingkat responsivitas dan kualitas kebijakan diposisikan sebagai kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya merespons tekanan sesaat dan juga mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kerja sama lintas sektor turut menjadi aspek penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi serta berkelanjutan, pendekatan ini memungkinkan fenomena viral dipahami dalam perspektif kebijakan publik dan diposisikan sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif serta akuntabel.

6. Peran Media Sosial dalam Transformasi Komunikasi Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Paradigma komunikasi politik telah diubah oleh media sosial dari pola linier dan satu arah menjadi komunikasi yang bersifat interaktif serta partisipatif dan Partisipasi terbuka didorong oleh media sosial melalui ajakan kepada berbagai pihak yang memiliki ketertarikan untuk memberikan kontribusi dan umpan balik secara langsung serta menyampaikan komentar dan membagikan informasi dalam waktu yang cepat dan tanpa batas (Liubana & Setyanto 2022). Media sosial saat ini ditegaskan oleh Juleha et al. (2024) sebagai sumber utama komunikasi publik yang memberikan pengaruh signifikan terhadap proses perumusan kebijakan, tata kelola yang lebih transparan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dituntut oleh perubahan tersebut dan posisi publik sebagai suara dalam dinamika politik semakin diperkuat melalui kemudahan akses informasi dan tersedianya saluran dialog dua arah yang terbuka. Peningkatan legitimasi kebijakan didorong oleh adaptasi pemerintah terhadap media sosial serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat diperbaiki secara berkelanjutan dan Fungsi media sosial sebagai ruang pengawasan sosial juga dijalankan melalui kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk memantau dan mengkritisi kinerja pemerintah secara waktu nyata, tata kelola yang lebih demokratis dan inklusif diarahkan oleh tingginya tingkat partisipasi publik tersebut dan Kebutuhan pengelolaan risiko disinformasi yang berpotensi mengganggu proses komunikasi juga dihadapi oleh pemerintah, media sosial dengan penerapan strategi yang tepat diposisikan sebagai instrumen penting dalam transformasi komunikasi politik modern serta sebagai pendorong reformasi tata kelola menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Bukti empiris disampaikan oleh Hayat et al. (2021) melalui temuan penelitian yang menunjukkan bahwa fitur interaktif dalam media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara politisi dan masyarakat

sehingga jarak komunikasi dapat diperpendek dan peluang dialog dua arah terbuka secara lebih luas dibandingkan media tradisional. Hubungan politik yang lebih personal dan interaktif diperkuat oleh kondisi tersebut serta ruang bagi berkembangnya beragam pandangan disediakan secara demokratis (Hayat et al., 2021).

Peran penting media sosial terlihat dalam perubahan perspektif komunikasi politik menuju model yang lebih interaktif dan partisipatif, media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian pesan melainkan juga dijalankan sebagai mediator demokrasi baru yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan responsif serta akuntabel. Pengelolaan risiko berupa penyebaran informasi palsu polarisasi dan hoaks perlu dilakukan secara cermat melalui penguatan literasi digital masyarakat serta penerapan kebijakan komunikasi strategis sehingga ekosistem komunikasi politik digital dapat terjaga secara sehat dan inklusif.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa respons kebijakan pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh konten viral di media sosial, perhatian publik terhadap isu tertentu tidak hanya dipercepat oleh viralitas konten tersebut dan pemerintah terdorong untuk mengambil tindakan cepat serta strategis guna mengatasi kekhawatiran masyarakat serta menjaga legitimasi kebijakan publik. Sebagai contoh konkret, kasus video viral Ompreng MBG yang memperlihatkan praktik pencucian nampan dengan air kotor menimbulkan respons cepat dari pemerintah daerah Bandung Barat, yang segera menghentikan operasional dapur MBG dan memperbaiki standar higienis. Demonstrasi besar pada Agustus 2025 terkait usulan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta menjadi bukti bahwa kemarahan publik meluas akibat viralitas isu di media sosial dan Aksi yang dikenal sebagai "Revolusi Rakyat Indonesia" ini berlangsung ricuh terutama di depan gedung DPR Jakarta dan sebagian besar demonstran merupakan pengemudi ojek online yang menyoroti ketidakadilan ekonomi. Viralitas isu meningkat setelah video kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan aparat selama kericuhan, tersebar luas dan pemerintah merespons dengan melakukan penyelidikan serta memberikan bantuan kepada keluarga korban dan menunda tunjangan DPR yang kontroversial mulai 31 Agustus 2025 sebagai langkah menenangkan publik dan menjaga stabilitas sosial-politik.

Studi ini menunjukkan bahwa dampak konten viral di media sosial terhadap respons kebijakan pemerintah bersifat signifikan dan tidak hanya mempercepat perhatian publik terhadap isu-isu tertentu dan mendorong pemerintah untuk bertindak cepat, viralitas konten juga menuntut kebijakan yang bijaksana guna menanggapi kekhawatiran publik serta mempertahankan legitimasi kebijakan. Contoh konkret terlihat pada video viral Ompreng MBG yang memperlihatkan praktik mencuci nampan dengan air kotor sehingga

respons segera diberikan oleh pemerintah daerah Bandung Barat yang langsung memberhentikan sementara operasional dapur MBG dan meningkatkan standar kebersihan, protes besar pada Agustus 2025 terkait usulan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta kepada anggota DPR memperlihatkan bahwa kemarahan publik dapat meluas akibat viralitas isu di media sosial dan Peristiwa yang dikenal sebagai “Revolusi Rakyat Indonesia” ini berlangsung kacau terutama di depan gedung DPR di Jakarta dan sebagian besar peserta adalah pengemudi ojek online yang menyoroti ketidakadilan ekonomi. Viralitas meningkat setelah video kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan pemerintah selama kerusuhan, tersebar luas dan pemerintah menanggapi situasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memberikan bantuan kepada keluarga korban serta menunda pemberian tunjangan DPR yang kontroversial mulai 31 Agustus 2025 untuk menenangkan publik dan menjaga stabilitas sosial-politik. Respons cepat ini memperlihatkan bahwa pemerintah semakin menyadari pentingnya menanggapi konten viral secara sigap guna mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

Tekanan sosial yang kuat terhadap pemerintah tercipta akibat peran influencer dan generasi muda sebagai aktor utama dalam penyebaran konten viral, sehingga pemerintah dituntut untuk merespons secara tepat dan bertanggung jawab dan tantangan rendahnya literasi digital di kalangan generasi muda menuntut upaya penguatan edukasi agar penyebaran informasi dapat memberikan dampak positif. Perubahan dalam komunikasi politik melalui media sosial membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun interaksi dua arah yang transparan dan partisipatif serta memperkuat tata kelola pemerintah modern melalui pengawasan sosial yang lebih efektif dan strategi jangka panjang dan terintegrasi perlu diterapkan dalam respons pemerintah terhadap konten viral untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, respons cepat terhadap konten viral tidak hanya mencerminkan kesiapan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi ekspektasi publik di era demokrasi digital.

Daftar Pustaka

Assadiyah, Diani. 2025. “Respons Publik Terhadap Isu Bendera One Piece di TikTok Menjelang HUT RI.” 3(2).

Azmi, Khairul. 2025. “FENOMENA VIRAL DI MEDIA SOSIAL : ANALISIS POLA KOMUNIKASI dan PENGARUHNYA TERHADAP.” 4307(May):1814–21.

Gunawan, Tedi. 2024. “Adaptasi Logika Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik Gerindra Menjelang Pemilu 2024.” 22(1):44–60.

Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, and Beni Ahmad Saebani. 2025. "Fenomena ' No Viral No Justice ' Perspektif Teori Penegakkan Hukum." 7(2):792–800.

Hernawan, Adam, and Kata Kunci. 2024. "Analisis Peran Influencer Dalam Mempengaruhi Opini Publik Di Media Sosial." 3(2):134–42.

Hidayat, Rahmatul, and Rury Ramadhan. 2025. "PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGONSTRUKSI OPINI PUBLIK TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH : STUDI KASUS WACANA PUBLIK TAHUN 2025." (1):64–75.

Husairi, Muhammad Salman, and Syawla Malika Azzahra. 2025. "Seberapa Besar Algoritma TikTok Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Kebijakan Kesehatan Di Jakarta Selatan The Influence of TikTok ' s Algorithm on Public Opinion Regarding Health Policy in South Jakarta." 5(2):810–15.

Juleha Juleha, Jusfira Yuniar, Nur Riswandi Marsuki³. 2024. "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital Universitas Muhammadiyah Makassar , Indonesia." 3(1).

Liubana, Ishak Winaldo, and Yugih Setyanto. 2022. "Analisis Peranan dan Penggunaan Media Sosial Dalam Mengomunikasikan Informasi Di Komunitas 234SC Jakarta Utara." 199–204.

Pratiwi, Feny Selly. 2024. "Peran Komunikasi Digital Dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial." 293–315.

Putri, Naraya Nursadrina, Dhini Aprilia Khoirunnisa, Dimas Wahyu Ilhamy, and Muhammad Ikhsan. 2025. "Pergeseran Budaya : Media Baru Sebagai Tiktok dan Aparatus Ideologi." 2(1):1–20.

Ramadhani, Resky Suci, Yunita Aluakafani Asia, and Abdul Haliq. 2025. "TOFEDU : The Future of Education Journal Satire and Sarcasm in Government Fuel Policy Critique : A Pragmatic Analysis of Rian Fahardhi ' s TikTok Video." 4(5):1291–99.

Salim, Sarah Amalina. 2025. "International Journal Of." 3(3):962–79.

Salsabila et., Al. 2025. "Pengendalian Sosial Dalam Meminimalisir Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Tiktok." 2(1):200–208.

Ulhaq Zulvikar Syambani, Rahmayanti Mayu. 2020. *PANDUAN PENULISAN SKRIPSI LITERATUR REVIEW*.

Wirakusuma, Muhammad Anfasha, and Agus Riwanto. 2022. "The E-Aspiration System as an Implementation of Public Participation from the Good Governance Perspective." 18(3):248–58.

M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(01), 104-114.

Sapos. (2025, Oktober 4). Dapur MBG di Bandung Barat Distop: Pencucian Nampan Ditemukan Tak Sesuai Standar Kebersihan. Sapos. Diambil dari <https://www.sapos.co.id/berita/2456657772/dapur-mbg-di-bandung-barat-distop-pencucian-nampan-ditemukan-tak-sesuai-standar-kebersihan>

MSi, V. S. F. S. (2025b, July 8). Viral-based policy: tantangan antara respons cepat dan mutu kebijakan. *Antara News*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com>

Pratiwi, P. S. (2025, March 5). Komunikasi Publik Pemerintah Merespons #kaburajadulu. Diambil dari <https://radvoice.id/blog/komunikasi-publik-pemerintah-kaburajadulu/>

MSi, V. S. F. S. (2025, Juli 8). Viral-based policy: tantangan antara respons cepat dan mutu kebijakan. *Antara News*. Diambil dari <https://www.antaraneews.com>

Kevin Lane Keller dan Philip Kotler (2016). *Marketing Manajemen Edisi ke 15/E* Essex Eangland: Pearson Education.